

BAB II

PERKEMBANGAN PENDIDIKAN TINGGI DI MALAYSIA

2.1 Sistem Pendidikan Nasional di Malaysia

2.1.1 Deskripsi Sistem Pendidikan Nasional Malaysia

Pada tahun 1957, Malaysia mewarisi sistem pendidikan yang terfragmentasi; sementara sebagian kecil penduduk menerima pendidikan di lembaga-lembaga elit, lebih dari setengah penduduk belum pernah menerima pendidikan formal. Tidak mengherankan, tingkat melek huruf dewasa berada pada angka yang cukup rendah, yaitu 52%. Hal tersebut menjadi tantangan bagi pemerintah dalam menjamin untuk mendapatkan pendidikan bagi semua anak tanpa terkecuali. Selama periode tahun 1956-1960, pendidikan berkembang dengan cepat. Hal tersebut sebagai wujud dari sebuah visi ambisius tentang bagaimana sistem pendidikan negara baru ini akan berbentuk. Prinsip-prinsip tersebut diatur sebagai dasar bagi Malaysia's first Education Act di tahun 1961. Maka, berkembanglah pandangan mengenai pendidikan yang bersifat holistik di mana bertujuan untuk mengembangkan kemampuan intelektual para siswa, kemampuan spiritual, emosional, dan kemampuan secara fisik.

Lebih dari lima dekade sejak kemerdekaan, sistem pendidikan telah melewati banyak tonggak penting, mulai dari kurikulum seperti Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) dan Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) yang dikembangkan berdasarkan (1979), hingga pengembangan Kurikulum Nasional yang disusun berdasarkan Sekolah Menengah (KBSM) yang dikembangkan (1979), hingga pengembangan Filsafat Pendidikan Nasional (1988)

dan Undang-Undang Pendidikan yang direvisi (1996). Namun, melalui semua perubahan ini, pencapaian akses, kualitas, dan keadilan dalam hal hasil belajar siswa, kesatuan di antara semua siswa, dan oleh karena itu efisiensi dan efektivitas sistem dalam menyediakan hal-hal tersebut, tetap menjadi landasan utama bagi sistem Pendidikan Nasional Malaysia.

Berdasarkan beberapa indikator, Malaysia telah berhasil secara jelas selama 50 tahun terakhir. Tingkat melek huruf dewasa pada tahun 2010 untuk penduduk berusia 15 tahun ke atas mencapai 92%. Tingkat partisipasi pendidikan dasar dan menengah bawah hampir mencapai 100%, sedangkan tingkat partisipasi pendidikan menengah atas mencapai 80%. Sekitar dua pertiga siswa melanjutkan ke bentuk pendidikan atau pelatihan pasca-menengah, mulai dari program persiapan universitas atau matrikulasi hingga lembaga vokasi.

Sistem pendidikan juga secara konsisten menghasilkan siswa dan sekolah yang setara dengan yang terbaik secara internasional. Hal ini dibuktikan tidak hanya oleh jumlah siswa yang berhasil diterima di universitas terkemuka di luar negeri, tetapi juga oleh jumlah penghargaan yang diraih oleh sekolah dan siswa Malaysia di tingkat internasional. Dalam Rencana Induk Sistem Pendidikan di Malaysia ini dirancang untuk menghadapi tantangan abad ke-21, berdasarkan laporan dan kebijakan sebelumnya berfokus pada cara-cara untuk mengembangkan dan memperluas jalan bagi pertumbuhan dan perbaikan sistem pendidikan berkelanjutan.

Kebijakan Sistem Pendidikan di Malaysia tersebut juga dilakukan melalui 3 fase, yaitu:

1. Fase 1: Merupakan kajian komprehensif dan diagnosis sistem pendidikan. Fase ini dimulai dengan evaluasi rinci dari kinerja sistem pendidikan Malaysia, dengan fokus pada capaian yang dihasilkan oleh pelajar, menilai akar penyebab dan pendorong utama untuk meningkatkan kinerja, dan mengenali contoh-contoh keunggulan yang terdapat dalam sistem pendidikan lainnya sebagai model untuk emulsi dan replikasi.
2. Fase 2: Berfokus pada pembangunan blueprint preliminary education dengan mengidentifikasikan prioritas pembangunan serta pembuatan program dari kebijakan yang lebih rinci dan mendetail. Fase ini menggabungkan hasil dialog nasional dengan GTP 2.0 lab pendidikan sebagai input. Pada April 2012, kementerian menyelenggarakan dialog nasional untuk menggali umpan balik dari rakyat sebagai masukan dari pembuatan sistem pendidikan. Dialog ini melibatkan peran orang tua, guru, dan murid. Dialog dipimpin oleh Tan Sri Dato' Dr. Wan Mohd. Zahid Mohd. Noordin yang mengepalai 16 townhalls (Putrajaya, Perak, Kedah, Sabah, Sarawak, Labuan, Negeri Sembilan, Melaka, Selangor, Penang, Pahang, Kelantan, Terengganu, dan Johor) yang dihadiri sebanyak 12.000 anggota perwakilan publik dan 20 sesi roundtable dengan 325 partisipan. Anggota juga memiliki kesempatan memberikan ide atau masukan melalui online portal MyEduReview, Facebook, dan Twitter. Lebih dari 150

memorendum telah masuk ke kementerian dengan total lebih dari 7.000 rekomendasi telah diterima. Sekitar 90 anggota dari kementerian terkait (seperti Departemen Keuangan, Departemen Sumber Daya Manusia, Departemen Pendidikan Tinggi dan Departemen Perempuan, Keluarga, dan Pengembangan Masyarakat) terlibat pada basis full-time. Kementerian mereview semua input baik dari dialog nasional maupun lab secara cermat, kemudian mengintegrasikannya ke dalam blueprint yang berdasarkan pada 4 kriteria, yakni:

1. Pertama, setiap tindakan yang dilakukan harus berkontribusi terhadap sistem dan merupakan hasil representasi dari para pelajar.
 2. Kedua, departemen menyesuaikan dengan keadaan internasional dalam mengidentifikasi dan memprioritaskan faktor-faktor yang membuat perbedaan besar dalam sistem dan perbaikan pelajar.
 3. Ketiga, usulan harus relevan dengan titik awal sistem dan berada dalam kemampuan departemen untuk mewujudkannya. Keempat, manfaat dari pelaksanaan proposal harus lebih besar daripada kerugian finansial dan operasional.
3. Fase 3: Berfokus pada keputusan akhir dari blueprint. Selama proses ini, upaya kementerian yakni memperoleh input yang bersifat independen dari masyarakat Malaysia dan Panel Review Internasional. Umpan balik diperoleh anggota melalui interaksi tatap muka, baik secara langsung maupun melalui video. Malaysia Panel Review: Sebanyak 12 warga

Malaysia terkemuka dari latar belakang profesional dan sektor swasta berkumpul, di bawah kepemimpinan Tan Sri Dato' Dzulkifli bin Abdul Razak, Wakil Rektor Albukhary International University. International Review Panel: Pemerintah menggelar workshop yang melibatkan empat pendidik global terkemuka. Pendidik ini melakukan kajian dan menyumbangkan inisiatif transformasi, dan mengajukan perspektif mereka berdasarkan tolak ukur Malaysia dan. Para anggota panel juga melakukan perjalanan ke Malaysia untuk melakukan lokakarya dan kunjungan lapangan di Q4 2012 dan akan memberikan umpan balik sebelum finalisasi Blueprint pada akhir 2012.

Kementerian Pendidikan Nasional Malaysia bekerja sama dengan lembaga-lembaga lain di bawah GTP, telah mencapai kemajuan signifikan dalam memperluas angka partisipasi pendidikan prasekolah dari 67% pada tahun 2009 menjadi 77% dalam waktu singkat dua tahun. Persentase siswa kelas 1 yang melek huruf telah meningkat dari 87%. Penilaian diagnostik independen berbasis Australia yang dilakukan setiap tahun.

Rencana Induk ini didasarkan pada tiga tujuan spesifik:

1. Memahami kinerja dan tantangan saat ini dari sistem sekolah Malaysia, dengan fokus pada peningkatan akses ke pendidikan, peningkatan standar (kualitas), penutupan kesenjangan prestasi (kesetaraan), dan mempromosikan persatuan di antara siswa serta memaksimalkan efisiensi sistem;

2. Menetapkan visi dan aspirasi yang jelas untuk sistem pendidikan dan siswa individu selama 13 tahun ke depan hingga 2025; dan
3. Menyusun program transformasi komprehensif untuk sistem, termasuk perubahan kunci pada Kementerian yang akan memungkinkan Kementerian tersebut memenuhi tuntutan baru dan harapan yang semakin tinggi, serta mendorong dan mendukung transformasi keseluruhan aparatur sipil negara.

Sistem pendidikan merupakan asas penting dalam membangunkan masyarakat yang berkualitas dan negara ke arah yang lebih baik. Malaysia merupakan negara yang mempunyai kemajemukan di mana setiap dasar yang dilaksanakan perlu selaras dengan keperluan masyarakatnya. Dasar pendidikan yang dilaksanakan bukan saja bertujuan untuk memberi pelajaran di tempat pendidikan saja, tetapi sebagai alat dalam merealisasikan perpaduan bangsa dan negara (Jamaluddin, 2011). Sistem pendidikan adalah intisari bagaimana pendidikan nasional suatu negara dapat diukur dan dinilai efektifitasnya. Dampak yang diberikan oleh sistem pendidikan akan berpengaruh terhadap output dari pembelajaran itu sendiri.

Di banyak negara, pengembangan pendidikan melibatkan peran pemerintah yang aktif dalam mendorong pencapaian tujuan dalam sistem pendidikan, sebagai contoh sistem pendidikan di Malaysia diatur oleh Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM). Pendidikan formal dimulai dari tingkat pra-sekolah. Pendidikan rendah, pendidikan menengah, pendidikan pra-universiti dan pengajian tinggi. Pendidikan merupakan tanggung jawab pemerintah federal Malaysia. Di

Malaysia, warga negara dapat memilih studi yang dimiliki oleh kerajaan, sekolah swasta maupun secara individu. Sekolah milik swasta maupun secara individu. Meskipun Malaysia menganut sistem kerajaan, tetapi kerajaan tidak memiliki hak untuk menentukan kurikulum atau cara pengajaran di dalam urusan pendidikan.

Pada tahun 2013, National Education Blueprint atau dokumen Cetak Biru Pendidikan (2015-2025) diterbitkan untuk menjelaskan secara umum rencana berupa visi-misi, roadmap pendidikan, deskripsi sistem pendidikan nasional, dan lainnya. Pendekatan didalam dokumen cetak biru ini merupakan terobosan karena menggunakan perspektif dalam mengevaluasi kinerja sistem pendidikan nasional Malaysia. Disamping itu, Sistem pendidikan nasional Malaysia diurusi penuh oleh Kementrian dalam memastikan kejelasan dan keselarasan yang dituangkan melalui kebijakan dibidang pendidikan. Kementrian telah mengidentifikasi 11 perubahan yang perlu dilakukan dalam mewujudkan hasil yang diharapkan oleh masyarakat Malaysia. Setiap perubahan yang ada dalam sistem pendidikan nasional Malaysia bertujuan untuk mengatasi satu dari lima hasil sistem berupa akses, kualitas, kesetaraan, kesatuan dan efisiensi.

Rencana dan perubahan sudah dialami oleh sistem pendidikan nasional Malaysia dari waktu ke waktu, seperti rencana peningkatan wajib belajar dari enam tahun menjadi sebelas tahun, dimulai dari usia enam tahun yang didukung program retensi bertarget, peluncuran Kurikulum Standar Sekolah Menengah atau Kurikulum Standar Sekolah Menengah (KSSM) dan revisi Kurikulum Standar Sekolah Dasar atau Kurikulum Standar Sekolah Rendah (KSSR) pada tahun 2017 untuk menanamkan seperangkat pengetahuan dan keterampilan yang selaras

dengan kemampuan berpikir kreatif, inovasi, pemecah masalah, kepemimpinan, dan menjabarkan standar pembelajaran yang jelas kepada siswa dan orangtua dalam memahami setiap tahap proses sekolah (Razaqna, 2024).

2.1.2 Struktur Pendidikan Nasional Malaysia

Negara Malaysia dalam mengembangkan pendidikan memiliki sistem pendidikan tersendiri tentunya seperti Negara-negara yang lain (Aslan, 2019). Ada 6 tingkatan pendidikan di Malaysia. Tingkatan-tingkatan ini terdiri dari siswa biasanya memulai taman kanak-kanak, tahap awal pendidikan formal, pada usia tiga atau empat tahun. Menyelesaikan tahap ini dapat memakan waktu satu atau dua tahun. Selama setahun penuh, siswa terdaftar dalam satu kelas. Mata pelajaran yang diajarkan di taman kanak-kanak meliputi Bahasa Melayu, Bahasa Inggris, kerajinan tangan, dan pendidikan jasmani termasuk di antara mata pelajaran yang diajarkan di taman kanak-kanak. Tingkat pendidikan kedua adalah taman kanak-kanak lanjutan. Saat siswa mulai masuk taman kanak-kanak lanjutan, mereka biasanya berusia lima tahun. Menyelesaikan tingkat ini memakan waktu satu tahun. Berikutnya sekolah dasar, yang dilaksanakan selama 6 tahun. Perilaku siswa, pekerjaan sekolah, kehadiran, dan nilai ujian digunakan untuk mengevaluasi mereka. Biasanya, kelulusan terjadi saat berusia 12 tahun/Kelas 6.

Kemudian, Level SMP-SMA Siswa diterima di sekolah menengah berdasarkan hasil ujian nasional yang diselenggarakan di seluruh negeri. Di Malaysia yang mengadopsi sistem yang sama seperti di Amerika Serikat, sekolah menengah atas pada dasarnya merupakan gabungan antara sekolah menengah

pertama dan sekolah menengah atas. Biasanya, sekolah menengah atas dibagi menjadi tiga tahun. Sekolah negeri dan sekolah swasta merupakan dua kategori utama sekolah menengah atas yang ada di Malaysia. Sistem sekolah menengah atas kategori swasta mirip dengan sistem sekolah yang ada di Taiwan. Jika siswa lulus ujian, mereka dapat melanjutkan ke program studi pasca-menengah umum selama dua tahun. Mereka harus menyelesaikan dua tahun studi pasca-menengah jika ingin melanjutkan pendidikan mereka. yang diakhiri dengan memperoleh sertifikat Cambridge sebagai syarat pendaftaran ke perguruan tinggi. Namun, tetap ada seleksi yang harus dilalui sebelum diterima di perguruan tinggi (Syakhrani dkk., 2022, hlm. 322).

Mantan Perdana Menteri Malaysia, Tun Abdullah Ahmad Badami, memperkenalkan enam strategi kunci pada tahun 2007 sebagai bagian dari Rencana Induk Pengembangan Pendidikan 2006-2010 (PIPP):

- (1) Pembangunan Negara-Bangsa
- (2) Pengembangan Sumber Daya Manusia
- (3) Penguatan Sekolah Nasional
- (4) Pengurangan Ketimpangan Pendidikan
- (5) Peningkatan Profesionalisme Guru
- (6) Peningkatan Kualitas Institusi Pendidikan

1. Peran Kementerian Pendidikan Nasional

Pemerintah Malaysia, melalui Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM), bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengembangan sistem pendidikan disana yang meliputi kebijakan, kurikulum, dan pelaksanaan berbagai program dibidang pendidikan guna meningkatkan kualitas pendidikan Malaysia. seiring berkembangnya zaman, sistem pendidikan Malaysia juga mengalami pembaruan dan perubahan. Salah satu perubahan yang signifikan terlihat adalah penerapan teknologi yang membuat dunia pendidikan semakin terdigitalisasi dan diintegrasikan kedalam pembelajaran. Selain itu, pemerintah Malaysia juga memastikan sistem pendidikan yang ada, bisa tetap relevan dengan perkembangan global dan kebutuhan pasar kerja yang terus berkembang (Mohd Naw, 2021).

Pada dasarnya, diselenggarakan dan dikelola melalui beberapa lembaga utama yang memiliki peran strategis dalam memastikan kualitas dan kesinambungan sistem pendidikan nasional. Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) memiliki peran sentral sebagai lembaga yang mengurus kurikulum nasional serta upaya peningkatan mutu pengajaran dengan memberikan pelatihan kepada tenaga pengajar/guru. Berikutnya adalah Lembaga Peperiksaan Malaysia (LPM) bertanggung jawab dalam merancang, melaksanakan, dan mengawasi berbagai seleksi ujian nasional seperti Ujian Pencapaian Sekolah Rendah (UPSR) dan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) yang berfungsi sebagai instrumen evaluasi capaian belajar siswa di tingkat dasar dan menengah. Terakhir, Dewan Pendidikan Nasional memegang peranan penting sebagai badan pengawas yang memastikan pengembangan, regulasi, serta kualitas institusi pendidikan tinggi agar tetap

selaras dengan arah kebijakan nasional. Ketiga lembaga ini secara umum membentuk fondasi yang solid bagi tata kelola pendidikan Malaysia secara komprehensif (Hadit Pratama et al., 2024).

2.2 Sistem Pendidikan Tinggi di Malaysia

2.2.1 Deskripsi Sistem Pendidikan Tinggi Malaysia

Sistem pendidikan tinggi di Malaysia adalah bagian integral dari strategi pembangunan pendidikan nasional yang berorientasi terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia, daya saing global, serta transformasi ekonomi berbasis pengetahuan. Sejak periode pasca kemerdekaan, pemerintah Malaysia secara konsisten memperluas dan memperkuat sektor pendidikan tinggi sebagai instrumen utama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi negara. Pendidikan tinggi dipandang sebagai sarana dalam pembekalan individu yang mumpuni dalam hal kompetensi, profesionalitas, keterampilan teknis, serta kemampuan intelektualitas yang sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja modern (Mohd Nawawi, 2021).

Dalam perkembangannya, Malaysia telah mengadopsi pendekatan massifikasi pendidikan tinggi guna meningkatkan akses terhadap dunia pendidikan tinggi. Sejak dekade 1990-an, pemerintah aktif memperluas kapasitas institusi pendidikan tinggi dengan tujuan meningkatkan angka partisipasi pendidikan tinggi di Malaysia secara signifikan. Kebijakan-kebijakan yang ada, disusun untuk memperluas kesempatan pendidikan sembari memperkuat daya saing ekonomi nasional dalam konteks globalisasi (Abdullah, 2018).

Untuk mencapai hasil yang diinginkan dalam hal akses, kualitas, dan keadilan, Pemerintah telah secara konsisten mengalokasikan sumber daya yang signifikan untuk mengembangkan sistem pendidikan. Sejak tahun 1980, pengeluaran Malaysia untuk pendidikan dasar dan menengah sebagai persentase dari PDB merupakan yang tertinggi di Asia Timur. Pada tahun 2011, pengeluaran Malaysia sebesar 3,8% dari PDB lebih tinggi daripada rata-rata OECD sebesar 3,4%. Komitmen ini untuk berinvestasi dalam pendidikan berkualitas tinggi telah menjadi landasan bagi kesuksesan sistem pendidikan dan negara yang banyak dicapai.

Rencana transformasi sistem pendidikan tinggi selama 11 tahun yang diusulkan sangat luas dan kompleks. Untuk memastikan sistem tidak terbebani berlebihan dan kelelahan dalam pelaksanaan dapat dihindari, Kementerian telah merancang strategi dan inisiatif dari 10 Perubahan secara bertahap melalui tiga gelombang, sehingga dapat dibangun secara berurutan satu sama lain seiring dengan peningkatan kapasitas dan kemampuan sistem, serta tingkat kesiapan Perguruan Tinggi (PT).

1. Gelombang Pertama akan berfokus pada pembentukan fondasi untuk transformasi sistem pendidikan.
2. Gelombang Kedua akan memperkenalkan perbaikan struktural lebih lanjut untuk mempercepat laju perubahan; dan
3. Gelombang Ketiga akan memperkuat kedudukan global sistem pendidikan tinggi Malaysia.

Sama seperti MEB, Pemerintah dan Kementerian berkomitmen untuk cara kerja baru guna mencapai hasil yang signifikan, berkelanjutan, dan merata, termasuk:

1. Menjaga komitmen dan fokus kepemimpinan di tingkat pimpinan tertinggi yang secara rutin ditinjau tentang kemajuan, memberikan bimbingan, dan menyelesaikan masalah terkait pelaksanaan Malaysia Education Blueprint (MEB) (HE). Pemerintah Malaysia juga berkomitmen untuk mengidentifikasi, mengembangkan, dan meningkatkan kemampuan kepemimpinan generasi berikutnya dari pemimpin sistem untuk memastikan kelanjutan dan konsistensi upaya transformasi;
2. Meningkatkan manajemen kinerja internal dan eksternal: serta menetapkan sistem manajemen kinerja terhadap individu dan institusi melalui KPI yang jelas. Sistem ini akan berinvestasi dalam pengembangan kapasitas untuk membantu individu mencapai target mereka, menghargai kinerja yang baik, dan menangani kinerja yang buruk tanpa menciptakan budaya saling menyalahkan. Kementerian juga akan mempublikasikan hasil kinerja secara tahunan agar masyarakat dapat memantau kemajuan dalam implementasi MEB (HE); dan
3. Berinteraksi dan berkolaborasi dengan pemangku kepentingan utama: Seiring dengan implementasi inisiatif MEB (HE), Kementerian akan terus mengumpulkan masukan dari semua pihak terkait, terutama perguruan tinggi, mahasiswa, dan industri, serta akan secara rutin menyampaikan perkembangan

dan permasalahan untuk memastikan bahwa seluruh sistem pendidikan terlibat dalam proses transformasi.

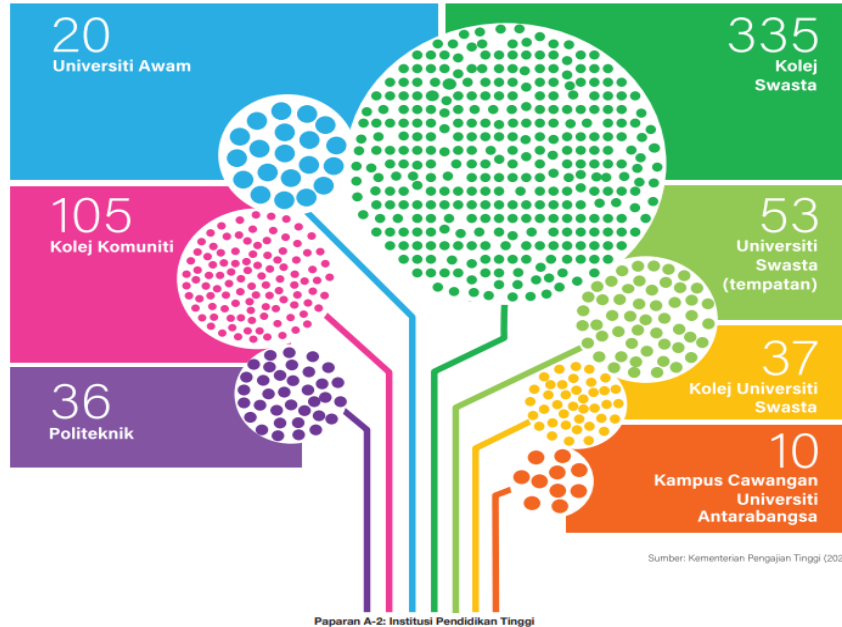
2.2.2 Struktur Pendidikan Tinggi Malaysia

Malaysia memiliki ekosistem pendidikan tinggi yang sangat maju dan beragam, terdiri dari 161 perguruan tinggi negeri (IPTA) dan 435 perguruan tinggi swasta (IPTS) per 31 Desember 2021. Komposisi IPTA mencakup 20 perguruan tinggi negeri, 36 politeknik, dan 105 perguruan tinggi komunitas yang tersebar di seluruh negeri, seperti yang ditunjukkan pada Lampiran A-2. Di antara perguruan tinggi negeri ini, lima di antaranya telah diberikan status universitas riset karena prestasi akademik dan kontribusinya yang signifikan. Selain itu, ada empat perguruan tinggi teknik yang berfokus pada teknik dan teknologi terapan, serta sebelas universitas komprehensif yang menawarkan program akademik yang lebih luas yang mencakup berbagai disiplin ilmu. Sementara itu, sektor IPTS menunjukkan pertumbuhan yang pesat dengan kehadiran 53 perguruan tinggi swasta lokal, 10 kampus cabang universitas internasional, 37 perguruan tinggi universitas swasta, dan 335 perguruan tinggi swasta. Keragaman lembaga-lembaga ini mencerminkan komitmen Malaysia untuk memperkuat akses, kualitas, dan daya saing pendidikan tinggi di tingkat regional dan global, menjadikan negara ini tujuan pilihan bagi mahasiswa lokal dan internasional.

INSTITUSI PENDIDIKAN TINGGI

KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI

● Setiap titik mewakili sebuah Institusi Pendidikan Tinggi di Malaysia



Gambar 2.5 Komposisi Institusi Pendidikan Tinggi di Malaysia
Sumber: Kementerian Pengajian Tinggi (2021)

1. Peran Kementerian Pendidikan Tinggi (MOHE)

Pendidikan tinggi memainkan peranan penting dalam memastikan kesinambungan sistem pendidikan di Malaysia. Dalam hubungan ini, Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2015–2025 (Pendidikan Tinggi) - PPPM (PT) telah dibangun dalam memastikan generasi masa depan negara yang memiliki nilai, ilmu pengetahuan dan kemahiran yang sewajarnya untuk mengangkat kedudukan Malaysia ke tahap yang lebih tinggi. PPPM (PT) yang didasari oleh 10 Poin penting, kini berada di fasa ketiga pelaksanaannya. Oleh itu, pembangunan Pelan Tindakan Pendidikan Tinggi Malaysia 2022–2025 (PTPTM) dilihat sangat signifikan dalam memastikan perkembangan pendidikan tinggi di negara ini, relevansinya dengan dunia ekonomi yang sangat kompetitif.

Kementerian Pendidikan Tinggi (KPT) akan terus memanfaatkan intisari PTPTM bagi memastikan inisiatif dan program yang dirancang dilaksanakan seiring dengan Rancangan Malaysia ke-12 dan Wawasan Kemakmuran Bersama 2030 (WKB, 2030). Pada saat yang sama, rencana tindakan ini juga akan memperkuat komitmen dan keterlibatan strategis Malaysia dalam meningkatkan taraf universitas yang ada di Malaysia di pemeringkatan kebangsaan dan antarabangsa, disamping mendukung Maklumat Pembangunan Mampan dalam Agenda 2030 (SDGs) yang diakui oleh semua negara-negara berdaulat dalam mencapai tujuan mulia tersebut. Kerangka rencana tindakan ini, merangkum aspek perancangan dan operasi di tingkat kementerian serta institusi yang mengarahkan IPT dalam menyesuaikan diri dengan transformasi yang berlaku. Pelaksanaan rencana tindakan ini juga akan mengizinkan IPT mengukuhkan kecemerlangan institusi dengan memperkuat proses pengajaran dan pembelajaran, penyelidikan serta manfaat kepada masyarakat. IPT juga diharuskan berupaya membangunkan hubungan yang lebih bermanfaat dengan pihak-pihak berkepentingan terkait.

2. Kerangka Malaysian Qualifications Framework (MQF)

Di Malaysia, pentingnya peran lembaga pendidikan tinggi dan pelatihan adalah untuk berkontribusi pada pembangunan sosial, ekonomi dan politik bangsa melalui produksi warga negara yang berkualitas, tenaga kerja yang sangat terampil dan berbakat dan pengetahuan baru telah diakui dengan jelas. Perkembangan ini telah dipandu secara luas oleh Filosofi Pendidikan Nasional. Memberdayakan aktualisasi kebijakan tersebut adalah Cetak Biru Pendidikan

Malaysia 2015-2025 (Pendidikan Tinggi) 1 yang menguraikan strategi, rencana, indikator kinerja utama, departemen yang bertanggung jawab, lembaga dan badan dalam sejumlah kerangka hukum yang kuat yang memungkinkan. Kerangka Kualifikasi Malaysia (MQF) 2 yang disetujui berdasarkan Undang-Undang Badan Kualifikasi Malaysia (MQA), 2007, memiliki peran kunci dalam pengaturan yang kompleks ini, yaitu untuk menetapkan standar kualifikasi untuk semua kualifikasi di sektor pendidikan tinggi dan pelatihan.

Keputusan penting yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dibuat pada tahun 2007, untuk mengembangkan kerangka kerja kualifikasi nasional dan menetapkan MQF. Undang-Undang MQA 2007 menetapkan MQF sebagai kerangka kerja menyeluruh untuk semua kualifikasi pasca-sekolah menengah, dengan serangkaian tujuan yang harus dipenuhi dan dilayani oleh MQA. Kerangka kerja ini 'berorientasi pada pembangunan', dan didukung oleh kebijakan dan peraturan pemerintah yang kuat, yang diamanatkan secara terpusat kepada MQF, para pemangku kepentingannya, dan dalam kemitraan dengan lembaga pendidikan tinggi dan pelatihan.

Semua program dan kualifikasi dalam sektor pendidikan tinggi dan pelatihan diharapkan mematuhi Kerangka Kerja Mutu Pendidikan Tinggi (MQF) sebagaimana disyaratkan oleh kebijakan nasional yang relevan sejak tahun 2011. Kerangka Kerja ini merupakan instrumen yang menetapkan klasifikasi kualifikasi nasional, jenjang pencapaian pembelajaran berdasarkan capaian pembelajaran, beban akademik yang ditentukan di setiap jenjang, dan dikaitkan dengan gelar kualifikasi yang disebutkan. "Tidak ada program yang akan terakreditasi kecuali

jika mematuhi Kerangka Kerja" sebagaimana diatur dalam undang-undang. Undang-undang ini mendukung sistem penjaminan mutu (QA) yang dipraktikkan oleh MQA, dan bertindak sebagai penjaga dan pengelola MQF.

MQA memperoleh kewenangannya dari Undang-Undang Parlemen (UU 679) yang memberinya kewenangan untuk menerapkan Kerangka Kualifikasi Malaysia, mengakreditasi program dan kualifikasi pendidikan tinggi, mengawasi dan mengatur mutu dan standar penyelenggara pendidikan tinggi, membentuk dan memelihara Daftar Kualifikasi Malaysia, serta mengatur hal-hal terkait. Oleh karena itu, MQA mengusulkan, memberi saran, membimbing, mengelola, dan mengatur sektor pendidikan tinggi dan pelatihan dengan mengacu khusus pada penjaminan mutu (Crosling, G. M., 2017).

2.2.3 Evolusi Kebijakan Pendidikan Tinggi

Perjalanan panjang Malaysia dalam peradaban negara, terlihat dari perjalanan panjangnya dalam mengelola pendidikan sebagai investasi jangka panjang negara. Di zaman yang semakin maju dan memerlukan fleksibilitas didalamnya, Malaysia terus bergerak ke arah ekonomi berbasis pengetahuan untuk bisa mendukung perekonomian negara melalui pemberdayaan pendidikan. Perubahan paradigma ini juga ikut menyertai inisiatif atau program strategis yang dicanangkan harus berkelanjutan guna memastikan tercapainya tujuan 250.000 mahasiswa asing pada tahun 2025-2030. Evolusi yang dilakukan Malaysia terus bergerak dalam koridor yang terpusat dengan pemerintah melalui kementerian pendidikan tinggi memastikan hal ini berjalan. Berikut adalah perjalanan pendidikan tinggi di Malaysia yang dituangkan melalui dokumen cetak biru negara:

1. Malaysia Education Blueprint 2013–2025

Sistem pendidikan tinggi Malaysia telah berkembang pesat selama beberapa dekade terakhir. Dalam sepuluh tahun terakhir saja, sistem ini telah mencapai peningkatan signifikan dalam pendaftaran mahasiswa, pengakuan global atas berbagai dimensi kunci seperti publikasi penelitian, paten, dan kualitas institusi, serta menjadi tujuan utama bagi mahasiswa internasional. Pencapaian ini merupakan bukti nyata dari dorongan dan inovasi komunitas akademik Malaysia, dukungan sektor swasta, serta investasi besar yang telah dilakukan Pemerintah. Meskipun demikian, Kementerian Pendidikan (Kementerian) menyadari bahwa sistem ini perlu terus berkembang agar tetap mengikuti, bahkan mungkin lebih maju, tren global. Misalnya, teknologi disruptif seperti robotika canggih, Internet of Things, dan otomatisasi pekerjaan berbasis pengetahuan diperkirakan akan mengubah lanskap bisnis dan sosial secara drastis dari kondisi saat ini. Mempersiapkan generasi muda Malaysia untuk berkembang di masa depan yang kompleks dan terus berubah ini membutuhkan transformasi yang sama mendasarnya dalam cara sistem pendidikan tinggi dan institusi pendidikan tinggi (HEI) beroperasi saat ini.

Pada bulan Oktober 2011, Kementerian Pendidikan meluncurkan kajian komprehensif terhadap sistem pendidikan di Malaysia dalam rangka mengembangkan Cetak Biru Pendidikan Nasional yang baru. Keputusan tersebut dibuat dalam konteks peningkatan standar pendidikan internasional, aspirasi Pemerintah untuk lebih mempersiapkan anak-anak Malaysia menghadapi kebutuhan abad ke-21, dan meningkatnya ekspektasi publik dan orang tua

terhadap kebijakan pendidikan. Selama 15 bulan (Oktober 2011 - Desember 2012), Kementerian tersebut memanfaatkan berbagai sumber masukan, mulai dari pakar pendidikan di UNESCO, Bank Dunia, OECD, dan enam universitas lokal, hingga kepala sekolah, guru, orang tua, siswa, dan anggota masyarakat lainnya dari setiap negara bagian di Malaysia. Hasilnya adalah Cetak Biru Pendidikan Malaysia yang mengevaluasi kinerja sistem pendidikan Malaysia saat ini dengan mempertimbangkan titik awal historis dan tolok ukur internasional. Cetak Biru tersebut juga menawarkan visi sistem pendidikan dan aspirasi siswa yang dibutuhkan dan layak didapatkan Malaysia, serta menyarankan 11 perubahan strategis dan operasional yang diperlukan untuk mencapai visi tersebut (MEB, 2013-2025).

Pada tahun 2013, Kementerian Pendidikan Tinggi mulai mengembangkan Cetak Biru Pendidikan Malaysia 2015–2025 (Pendidikan Tinggi) atau MEB (PT). Selama dua tahun, Kementerian memanfaatkan berbagai sumber masukan, mulai dari pakar pendidikan Malaysia dan internasional, hingga para pemimpin Lembaga Pendidikan Tinggi Malaysia (HEI) dan masyarakat umum. Hasil akhirnya adalah cetak biru yang dikembangkan oleh warga Malaysia, untuk warga Malaysia, dan yang akan mempersiapkan Malaysia untuk tahap akhir perjalanannya menuju negara berpenghasilan tinggi.

2. Transformasi menuju ekonomi berbasis pengetahuan

Perjalanan kemerdekaan Malaysia di bidang ekonomi sudah mencapai umur 43 tahun sejak 1957-2000. Sepanjang waktu tersebut, telah banyak pengalaman dan pembelajaran ekonomi yang dilalui, disamping mencatatkan rekor pertumbuhan ekonomi antarbangsa daripada melihat proses regionalisme dan globalisasi yang diakui oleh World Bank (1993) atas kejayaan Malaysia dalam mengurus perekonomian negara telah diakui sebagai keajaiban di awal tahun 1990an. Pada masa itu, sistem ekonomi negara terutama di sektor rill; jasa dan manufaktur serta keuangan diliberalisasikan mengikuti kapasitas kemampuan mereka. Sementara sektor swasta diberi peran utama untuk memacu pertumbuhan ekonomi negara pada tahun 1990-an melalui kebijakan privatisasi dan perserikatan Malaysia, berbeda dengan peran pemerintah/Kerajaan yang sangat dominan terlihat dari kebijakan afirmatif sebelumnya (Dasar Ekonomi Baru 1970-1990).

Bagaimanapun pertumbuhan ekonomi Malaysia sebelum tahun 1990-an, bertumpu pada ekonomi berbasis produksi, di mana Sebagian besar pendapatan atau output nasional dihasilkan melalui penerimaan negara seperti tenaga kerja/buruh, investasi asing, dan sumber daya bahan mentah. Pertumbuhan pada masa itu dinilai masih belum mampu mendongkrak pemasukan negara karena tidak mencapai hasil yang sesuai apabila tidak disertai dengan kemampuan untuk bisa mengadopsi teknologi baru yang berkualitas dalam memproses input-output negara. Menyadari keterbatasan tersebut, Malaysia mulai beralih sejak tahun 1980-an untuk meluaskan sektor industri teknologi yang bekerja sama dengan

multinasional Amerika Serikat, Jepang, dan Taiwan atau yang dikenal dengan koridor (MSC).

Investasi di bidang pendidikan tinggi telah menjadi salah satu kebijakan utama dalam Pembangunan ekonomi di sebagian besar negara, termasuk Malaysia. Institusi pendidikan tinggi memegang peranan penting dalam menghasilkan masyarakat berpendidikan tinggi yang dibutuhkan dalam perekonomian global seperti saat ini. Pendidikan adalah aset utama dalam pengembangan modal manusia (Amirah et al., n.d.).

Kegagalan dalam Pembangunan sektor Pendidikan tinggi berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan yang cukup krusial, seperti pengangguran, kriminalitas, penyalahgunaan narkoba, dan meningkatnya beban sosial dan politik bagi kerajaan. Oleh karena itu, dalam meningkatkan kualitas sumber daya tenaga kerjanya, pendidikan dan pelatihan (terutama dalam bidang sains dan teknologi) adalah mutlak pentingnya bagi ekonomi berbasis pengetahuan yang dijadikan nilai bagi perekonomian negara atau yang dikenal dengan istilah *K-Economy*. Setiap individu yang berilmu dan berpengetahuan harus memahami perubahan lingkungan yang ada dan mengambil peluang sosio-ekonomi untuk kepentingan objektif masing-masing diantara mereka. Kemajuan pendidikan dan pelatihan yang diupayakan oleh negara dalam mengambil setiap peluang kemajuan akan mempengaruhi Pembangunan di Malaysia secara keseluruhan.

2.3 Mobilitas Mahasiswa Asing

2.3.1 Pergeseran Paradigma Pendidikan Tinggi Malaysia

Dalam beberapa dekade terakhir, banyak universitas yang ada di Malaysia memiliki keunggulan untuk menyediakan layanan pembelajaran, pemasaran, dan transfer ilmu yang mumpuni sebagai kunci dari infrastruktur pengetahuan. Hal ini membentuk banyak kota di Malaysia layak memiliki label dan standar pendidikan yang unggul (Carrillo 2004; Martinez-Fernandez, 2008; Yigitcanlar et al, 2008b). Universitas pernah digambarkan sebagai ‘menara gading’ yang hanya fokus pada praktik pembelajaran akademik yang tradisional seperti pengajaran dan penelitian semata. Dengan sedikit komitmen serius untuk menangani pertanyaan yang muncul dari konteks spasial sosio-ekonomi di Malaysia (Gunasekara, 2004). Namun di era globalisasi seperti saat ini, peran universitas menjadi signifikan dengan munculnya istilah ekonomi berbasis pengetahuan yang artinya lebih banyak lagi tuntutan harus dipenuhi. Saat ini, universitas sebagai pendorong utama inovasi dan perubahan dalam sains, teknologi, dan disiplin kreatif lainnya. Lebih penting lagi, universitas dianggap menawarkan *roadmap* baru bagi pengembangan arah kebijakan kerajaan Malaysia untuk mencapai visi negara Malaysia di masa depan.

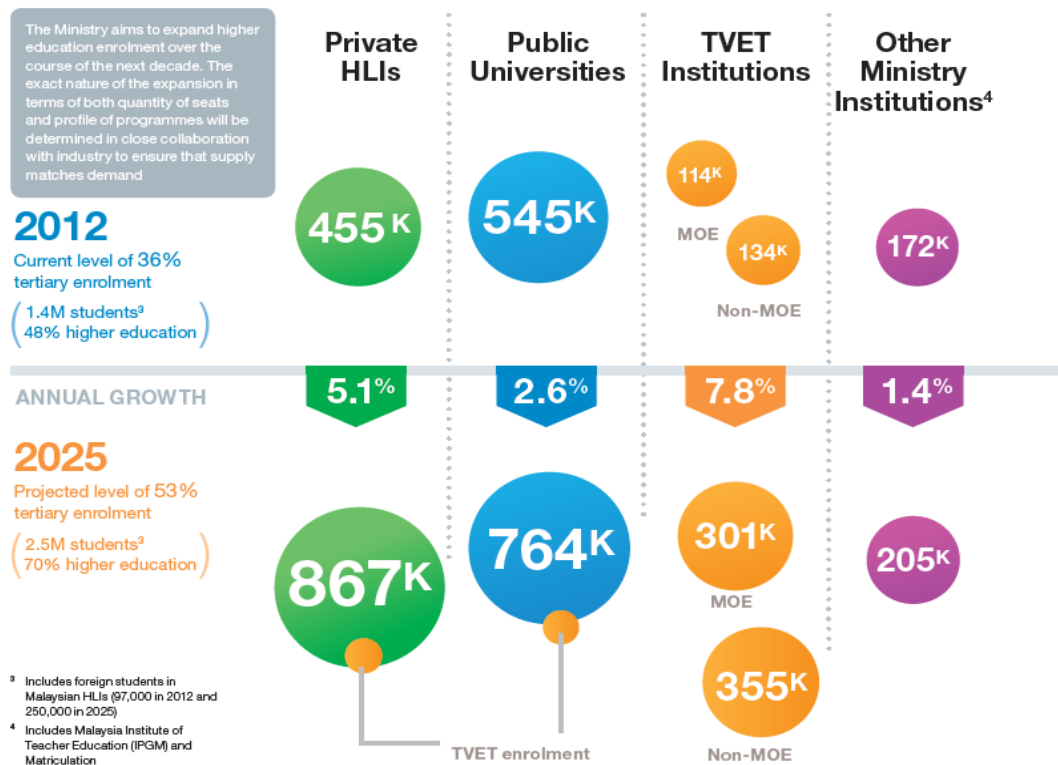
Terbukanya Malaysia terhadap arus globalisasi menandakan babak baru terhadap arah pengembangan dan pembenahan negara untuk mencapai standar yang ingin diraih. Hal ini bisa dilihat daripada pergeseran paradigma ekonomi Malaysia, dari ekonomi berbasis sektor primer menjadi ekonomi berbasis pengetahuan yang lebih relevan dengan kebutuhan zaman. Visi Malaysia 2020,

merupakan rencana 30 tahun untuk mendorong Malaysia mencapai tingkat kesetaraan dengan negara-negara maju dalam hal kinerja ekonomi dan kemampuan teknologi (Yusuf and Nabeshima, 2009). Kontekstualisasi transfer ilmu dan pengetahuan harus diintegrasikan dalam visi dan tantangan untuk membangun masyarakat ilmiah yang progresif, inovatif, dan visioner yang tidak hanya menjadi konsumen teknologi tetapi juga kontributor bagi peradaban ilmiah terhadap ilmu, sains, dan teknologi di masa depan (Faaland dkk., 2003).

Disamping itu, Filosofi Pendidikan Nasional Malaysia, yang ditulis pada tahun 1988 dan direvisi pada tahun 1996, mengukuhkan visi Kementerian dan Pemerintah dalam memandang pendidikan sebagai sarana untuk pengembangan holistik seluruh anak: secara intelektual, spiritual, emosional, dan fisik. “Pendidikan di Malaysia merupakan upaya berkelanjutan untuk mengembangkan potensi individu secara holistik dan terintegrasi, guna menghasilkan individu yang seimbang dan harmonis secara intelektual, spiritual, emosional, dan fisik, berdasarkan keyakinan yang kokoh dan pengabdian kepada Tuhan. Upaya ini dirancang untuk menghasilkan warga negara Malaysia yang berpengetahuan dan kompeten, yang memiliki standar moral yang tinggi, serta yang bertanggung jawab dan mampu mencapai tingkat kesejahteraan pribadi yang tinggi, serta mampu berkontribusi pada keharmonisan dan kemajuan keluarga, masyarakat, dan bangsa secara keseluruhan.

2.3.2 Rekam jejak mahasiswa asing di Malaysia

Arus mahasiswa internasional di Malaysia pada umumnya sudah meningkat secara drastis sejak tahun 1996, pemerintah Malaysia secara resmi mengadakan reformasi berbagai kebijakan tentang pendidikan tinggi untuk diperkenalkan dan masuknya mahasiswa internasional ke lembaga pendidikan tinggi yang ada di Malaysia. Malaysia mempunyai target sebesar 100.000 mahasiswa internasional pada tahun 2010 dan meningkat pada tahun 2025 sebesar 250.000 mahasiswa internasional. Hal ini tertuang pada *Malaysia Education Blueprint on Focus to Higher Education*,



Gambar 2.6 jumlah mahasiswa di institusi pendidikan tinggi Malaysia
Sumber: Malaysia Education Blueprint (2015-2025)

Sejak kejadian 9 September 2011, banyak sektor primer di dunia ikut terdampak baik itu ekonomi, politik, sosial, dan budaya, termasuk pendidikan didalamnya. Hal ini menimbulkan banyak spekulasi masyarakat internasional untuk bisa memilih batas kenyamanan dan keamanan pada saat itu, termasuk dalam urusan memilih negara untuk dijadikan studi pendidikan tinggi di berbagai tingkatan. Amerika Serikat, Inggris, dan Australia dipilih menjadi tujuan pelancong asing untuk bisa menempuh studi pendidikan disana, namun dampak peristiwa 9/11 telah menyebabkan penurunan jumlah pendaftar asing dari berbagai negara terutama Timur Tengah dan Asia yang memilih ketiga negara favorit diatas untuk dijadikan tempat menempuh studi pendidikan tinggi.

Top 10 every country that conducted higher education studies in the three favorite countries (1997-2006)

	<u><i>Country</i></u>										
	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	
<i>Amerika Serikat</i>	Canada	22,984	22,051	22,746	23,544	25,279	26,514	26,513	27,017	28,140	28,202
	China	42,503	46,958	51,001	54,466	59,939	63,211	64,757	61,765	62,523	62,582
	Germany	8,990	9,309	9,568	9,800	10,128	9,613	9,302	8,745	8,640	8,829
	India	30,641	33,818	37,482	42,337	54,664	66,836	74,603	79,736	80,466	76,503
	Indonesia	12,461	13,282	12,142	11,300	11,625	11,614	10,432	8,880	7,760	7,575
	Japan	46,292	47,073	46,406	46,872	46,497	46,810	45,960	40,835	42,215	38,712
	Malaysia	14,527	14,597	11,557	9,074	7,795	7,395	6,595	6,483	6,142	5,515
	Mexico	8,975	9,559	9,641	10,607	10,670	12,518	12,801	13,329	13,063	13,931
	South Korea	37,130	42,890	39,199	41,191	45,685	49,046	51,519	52,484	53,358	58,847
	Taiwan	30,487	30,855	31,043	29,234	28,566	28,930	28,017	26,178	25,914	27,876
	Thailand	13,481	15,090	12,489	10,983	11,187	11,606	9,982	8,937	8,637	8,765
	Turkey	8,124	9,081	9,377	10,100	10,983	12,091	11,601	11,398	12,474	11,622
	<i>Inggris</i>	Canada	22,984	22,051	22,746	23,544	25,279	26,514	26,513	27,017	28,140
China		42,503	46,958	51,001	54,466	59,939	63,211	64,757	61,765	62,523	62,582
Germany		8,990	9,309	9,568	9,800	10,128	9,613	9,302	8,745	8,640	8,829
India		30,641	33,818	37,482	42,337	54,664	66,836	74,603	79,736	80,466	76,503
Indonesia		12,461	13,282	12,142	11,300	11,625	11,614	10,432	8,880	7,760	7,575
Japan		46,292	47,073	46,406	46,872	46,497	46,810	45,960	40,835	42,215	38,712
Malaysia		14,527	14,597	11,557	9,074	7,795	7,395	6,595	6,483	6,142	5,515
Mexico		8,975	9,559	9,641	10,607	10,670	12,518	12,801	13,329	13,063	13,931
South Korea		37,130	42,890	39,199	41,191	45,685	49,046	51,519	52,484	53,358	58,847
Taiwan		30,487	30,855	31,043	29,234	28,566	28,930	28,017	26,178	25,914	27,876
Thailand		13,481	15,090	12,489	10,983	11,187	11,606	9,982	8,937	8,637	8,765
Turkey		8,124	9,081	9,377	10,100	10,983	12,091	11,601	11,398	12,474	11,622

<i>Australia</i>	Country	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
	Canada	22,984	22,051	22,746	23,544	25,279	26,514	26,513	27,017	28,140	28,202
	China	42,503	46,958	51,001	54,466	59,939	63,211	64,757	61,765	62,523	62,582
	Germany	8,990	9,309	9,568	9,800	10,128	9,613	9,302	8,745	8,640	8,829
	India	30,641	33,818	37,482	42,337	54,664	66,836	74,603	79,736	80,466	76,503
	Indonesia	12,461	13,282	12,142	11,300	11,625	11,614	10,432	8,880	7,760	7,575
	Japan	46,292	47,073	46,406	46,872	46,497	46,810	45,960	40,835	42,215	38,712
	Malaysia	14,527	14,597	11,557	9,074	7,795	7,395	6,595	6,483	6,142	5,515
	Mexico	8,975	9,559	9,641	10,607	10,670	12,518	12,801	13,329	13,063	13,931
	South Korea	37,130	42,890	39,199	41,191	45,685	49,046	51,519	52,484	53,358	58,847
	Taiwan	30,487	30,855	31,043	29,234	28,566	28,930	28,017	26,178	25,914	27,876
	Thailand	13,481	15,090	12,489	10,983	11,187	11,606	9,982	8,937	8,637	8,765
	Turkey	8,124	9,081	9,377	10,100	10,983	12,091	11,601	11,398	12,474	11,622

Gambar 2.7 Destinasi ternama tujuan studi mahasiswa asing di dunia
 Sumber: Verbik and Lasanowski (2007)

Sebagai negara yang juga juga beradaptasi terhadap perubahan global, termasuk bersaing untuk bisa mendapatkan pasar mahasiswa internasional di kawasan asia khususnya. Berdasarkan analisis Verbik dan Lasanowski (2007), malaysia memiliki pangsa pasar mahasiswa internasional sekitar 2% dengan sekitar 55.000 mahasiswa asing terdaftar di institusi pendidikan tinggi yang ada disana. Sebagian besar mahasiswa asing tersebut berasal dari negara-negara tetangga yang memiliki mobilitas mahasiswa internasional yang cukup signifikan seperti Indonesia, Thailand, Bangladesh, Maldives, India, Pakistan, Singapura, dan China. Setelah kejadian 9/11 tampaknya Malaysia telah diuntungkan karena dianggap sebagai kompetitor utama negara yang menggalakan internasionalisasi di bidang pendidikan tinggi bersaing dengan Singapura di kawasan Asia Tenggara.

Institusi pendidikan tinggi swasta yang ada di Malaysia dijadikan contoh yang tepat terkait keberhasilannya dalam merekrut mahasiswa asing. Misalnya INTI International University College yang berada di Negeri Sembilan, memiliki setidaknya 60% populasi mahasiswa asing yang didominasi mahasiswa berkewarganegaraan China. Berdasarkan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa mahasiswa asal Tiongkok berkontribusi sekitar 35% keseluruhan dari total

pendaftaran mahasiswa asing yang ada di Malaysia. Hal ini dikarenakan, kedekatan geografis yang ada antara kedua negara tersebut. Disamping itu mobilitas mahasiswa antara Malaysia, Singapura, dan Tiongkok cukup signifikan karena kesamaan sosio-budaya dan bahasa antara ketiga negara tersebut, terutama di kalangan etnis Tionghoa di Malaysia dan Singapura.

Year	Public	Private	Total
2002	5,045	22,827	27,872
2003	5,239	25,158	30,397
2004	5,735	25,939	31,674
2005	6,622	33,903	40,525
2006	7,941	36,449	44,390
2007 (July)*	12,419	33,131	45,550

Gambar 2.8a Jumlah Mahasiswa Asing di Malaysia

Sumber: *Minsitry of Higher Education Malaysia (2007)*, berdasarkan visa/paspor yang dicatat oleh departement imigrasi, Malaysia.

Year	Total
2013	116.300
2014	135.000
2023	104.315
2024	155.986
2025	195.878

Gambar 2.8b Jumlah Mahasiswa Asing di Malaysia

Sumber: Olahan Data Sekunder, 2026

2.3.3 Model perkembangan pendidikan tinggi di Asia: Jepang dan Korea

Selatan

Mobilitas mahasiswa internasional di Malaysia mengarahkan kepada pengembangan model "push-pull" yang dianjurkan oleh (Davis, 1995). Dalam pemodelan tersebut dijelaskan, faktor faktor "push" menciptakan minat umum

terhadap pendidikan di luar negeri tetapi tidak memberikan arah spesifik kepada individu. Disisi lain, faktor "pull" dianggap sebagai kondisi spesifik di negara tujuan/penerima yang mengarahkan mahasiswa ke tujuan tertentu. Negara penerima biasanya akan menerapkan strategi untuk meningkatkan keunggulan yang dirasakan guna mempengaruhi faktor tarik dalam pengambilan keputusan. Tetapi, mengoptimalkan faktor pendorong adalah salah satu opsi utama juga yang harus dipilih oleh negara penerima jika mobilitas mahasiswa internasional mengarahkan kepada aliran sumber daya yang serius.

Secara khusus dua kondisi utama dari negara asal, tampaknya memang terkait langsung dengan peningkatan mobilitas mahasiswa asing yang signifikan:

- (1) Kekayaan dan status perkembangan yang terjadi di negara penerima
- (2) Sejauh mana suatu negara menginvestasikan sumber dayanya dalam pengembangan manusia atau yang berkontribusi terhadap indeks pembangunan manusia.
- (3) Respon positif negara tuan rumah dalam menghilangkan hambatan dan kendala juga dapat memfasilitasi Mobilitas mahasiswa asing di negara tersebut.

Keberhasilan negara maju yang bisa dijadikan model dari majunya pendidikan tinggi yang terjadi disana, seperti Singapura, Taiwan, Tiongkok, Jepang, dan Korea bisa dijadikan komparasi sekaligus motivasi yang nyata bagi Malaysia dalam memandang pendidikan tinggi sebagai komponen penting kemajuan negara. Data terbaru terkait peringkat universitas yang ditampilkan oleh *QS World University Rankings 2026* menempatkan kelima negara tersebut kedalam

masuk kedalam 50 besar universitas terbaik yang ada di dunia saat ini. Pencapaian tersebut bukanlah hasil instan yang diperoleh oleh negara-negara tersebut, melainkan proses panjang dalam mengelola sektor pendidikan yang berkontribusi besar terhadap kemajuan di masing-masing negara.

Tabel 2.1 Pemeringkatan Universitas ternama di Asia

No	Universitas	Negara	Ranking
1	National University of Singapore	Singapura	8
2	The University of Hong Kong	Hongkong, Taiwan	11
3	Nanyang Technological University	Singapura	12
4	Peking University	Beijing, China	14
5	Tsinghua University	Shanghai, China	17
6	Fudan University	Shanghai, China	30
7	The Chinese University of Hong Kong	Tokyo, Japan	32
8	The University of Tokyo	Tokyo, Japan	36
9	Seoul National University	Seoul, Korea Selatan	38
10	The Hong Kong University of Science and Technology	Hong Kong, Taiwan	44
11	Shanghai Jiao Tong University	Shanghai, China	47
12	Zhejiang University	Hangzhou, China	49
13	Yonsei University	Seoul, Korea Selatan	50

Sumber: *QS World University Rankings 2026*

Permodelan di era moderniasi bisa dijadikan contoh yang tepat untuk melihat proses bagaimana pendidikan dikelola di negara seperti Jepang dan Korea Selatan. Di Jepang, pendidikan tinggi sudah dikelola kurang lebih 100 tahun lamanya. Restorasi Meiji adalah titik balik dimana pemerintah Jepang mendirikan universitas tokyo dengan prodi kedokteran dan studi barat. Kemudian, pemerintah jepang mengeluarkan UU 1918 memperluas jangkauan pendidikan tinggi disana,

seiring dengan kelompok, individu, dan swasta dalam memenuhi permintaan industri dan perdagangan pada periode industrialisasi ekonomi Jepang. Disamping mengalami perubahan secara kuantitatif, pendidikan tinggi di Jepang juga pernah mengalami perubahan pada strukturnya, dimana pemerintah berupaya memperluas pendidikan tinggi dengan mengubah sikapnya terhadap sektor swasta dalam mengelola pendidikan tinggi. Undang-undang subsidi promosi sekolah swasta 1975 disahkan yang memungkinkan lembaga swasta dalam pendidikan tinggi di Jepang menerima subsidi yang substansial namun harus melepaskan sebagian kendali kepada pemerintah Jepang.

Pemerintah Jepang pada kenyataannya telah mendorong proses pengembangan sektor pendidikan tinggi, hal ini bisa dilihat dari tumbuhnya sektor swasta dalam pendidikan tinggi secara stabil yang menempati sekitar $\frac{3}{4}$ dalam urusan pendidikan tinggi disana (Marlow-Ferguson, 2002b). Antusiasme yang begitu pesat dialami oleh masyarakat Jepang itu sendiri ditambah banyaknya minat pelancong asing yang memilih Jepang karena memang kapasitas mereka yang mampu mengadopsi pendidikan tinggi yang modern disertai dengan penerapan teknologi digital membantu proses kemajuan sektor pendidikan disana.

Pemodelan lainnya adalah Korea Selatan yang juga mengalami ledakan pendidikan tinggi yang tidak mencukupi pada dekade sebelumnya, meskipun masyarakat disana memiliki semangat yang tinggi untuk pendidikan (Ch'oe, Lee, & Bary, 2000; R. Kim, 1991). Menanggapi hal tersebut, banyak lembaga swasta didirikan, dan proporsi lembaga swasta dalam pendidikan tinggi pada tahun 1990 mencapai sekitar 75% dari total pendaftaran yang ada. Korea telah melakukan

upaya besar dalam meningkatkan kapasitas sistem pendidikannya, dalam dua dekade terakhir, pendanaan pemerintah telah dicurahkan untuk meningkatkan kualitas dan daya saing lembaga pendidikan tinggi disana, hal ini terlihat dari anggaran pendidikan yang meningkat menjadi dari 9,2% di tahun 2005 menjadi sebesar 15% (Jeung et al., 2015).

Setiap inisiatif mencerminkan 3 pilar utama yang dijadikan landasan bagi pemerintah Korea, penelitian, pengajaran, dan pendidikan teknik. Melalui banyaknya proyek pendanaan yang disesuaikan oleh kebutuhan universitas dan bidang spesifiknya. Seperti, proyek kemajuan pendidikan perguruan tinggi (ACE) untuk sarjana, proyek pemimpin dalam kerja sama industri dan universitas (LINC), serta proyek yang berkontribusi dalam peningkatan riset dan inovasi penelitian (Jeung et al., 2015).

Namun yang menjadi catatan penting adalah bahwa pendidikan tinggi yang ada di Korea Selatan bersifat tersentralisasi dengan kementerian pendidikan memiliki kendali penuh atas seluruh lembaga pendidikan tinggi yang ada disana. Kementerian pendidikan Korea Selatan secara ketat mengontrol pendirian lembaga swasta dan hanya memberikan sedikit subsidi (Altbach & Salmi, 2012). Tidak seperti kebanyakan negara, Korea Selatan mengontrol ketat mulai dari total pendaftaran mahasiswa di setiap lembaga baik itu publik atau swasta, mahasiswa antara departemen yang ada disesuaikan dengan kuota penerimaannya. Pemerintah Korea Selatan pada intinya menetapkan kuota penerimaan lembaga pendidikan tinggi berdasarkan rencana pembangunan ekonomi dan perkiraan kebutuhan tenaga kerja sejak akhir tahun 1960-an (Yoon, 1979). Hasilnya, pada 2 Juli 2021, Korea

Selatan mengakhiri statusnya sebagai negara berkembang menjadi negara maju, setelah mendapatkan pengakuan oleh United Nations Conference on Trade and Development karena komitmennya dalam mendorong investasi besar-besaran di bidang pendidikan, teknologi, dan industri kreatif yang mempengaruhi kinerja ekonomi di negara tersebut.

Jepang mulai mempromosikan pendidikan tinggi pada abad-19 dan upayanya membuahkan hasil berupa kemakmuran ekonomi yang dialaminya. Korea Selatan terkonsentrasi dalam waktu singkat dimana inflasi membuat kecepatan ekspansi pesat mereka dibidang pendidikan. Penting untuk dicatat bahwa tidak ada metode ajaib bagi setiap negara untuk memperoleh hasilnya yang signifikan. Penting untuk memahami karakteristik negaranya memberikan efek “push” dan “pull” di setiap masanya.

Kesimpulannya, Baik itu Jepang maupun Korea Selatan telah membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi pesat dialami mereka, bukan semata-mata karena faktor tunggal, tetapi murni karena sumber daya manusia yang ada. Menerapkan kebijakan yang ketat dan stabil, membuka peluang internasionalisasi dibidang pendidikan tinggi, sampai kepada perluasan sektor swasta adalah contoh nyata yang sudah dilakukan oleh Jepang dan Korea Selatan di setiap dekadenya. Walaupun terdapat perbedaan, Jepang tetap mempertahankan pola komposisi pendaftaran selama 40 tahun sejak 1960-an, sementara Korea Selatan memiliki pola komposisi yang berbeda. Kedua negara tersebut memiliki dampak positif dari perluasan dibidang pendidikan tinggi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional karena menyediakan tenaga kerja berpendidikan tinggi selama masa industrialisasi.